

A MULTIDIMENSIONAL OVERVIEW OF POLITICAL PARTICIPATION IN BONDOWOSO REGENCY

GAMBARAN MULTIDIMENSI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN BONDOWOSO

Haressa Lintang Rizkika¹, Zainul Mukid², Iffan Gallant El Muhammady³

¹Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur-Indonesia, ²Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Jawa Timur – Indonesia, ³Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Jawa Timur – Indonesia

Corresponding author: haressa.lintang.rizkika-2023@psikologi.unair.ac.id

Article Information: submission received:2 February 2025; revision: 12 March 2025; accepted 18 April 2025; first published online 19 April 2025

Abstract

This study aims to describe the multidimensional level of political participation among the people of Bondowoso Regency. Data were collected from 92 respondents who met the criteria of being Bondowoso residents and having participated in political activities, particularly elections. The indicators of political participation examined in this study include trust, awareness, knowledge, and active engagement in political processes. To ensure the reliability and validity of the findings, a previously validated political participation measurement tool was adopted. This instrument was adapted from prior research on political participation in Indonesia, with adjustments made to fit the local context of Bondowoso. Descriptive analysis results indicate that the majority of respondents exhibit low to moderate levels of political trust, while their political knowledge generally falls within the moderate category. The study also reveals that despite having a relatively good level of political awareness, this alone is insufficient to foster more active political participation without strong trust in political institutions. Nevertheless, this study has several limitations, including a relatively small sample size and potential bias in the measurement instruments. Future research is recommended to expand the sample size, develop more robust measurement tools, and consider broader contextual factors to gain deeper insights into the dynamics of political participation and public perceptions of local political processes.

Keywords: Political participation, Political trust, Political awareness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi politik secara multidimensi masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Data dikumpulkan dari 92 responden dengan kriteria warga Bondowoso dan pernah mengikuti kegiatan politik utamanya Pemilu. Indikator dalam partisipasi politik yaitu: kepercayaan, kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi politik. Dalam penelitian ini, adopsi alat ukur partisipasi politik yang telah divalidasi sebelumnya digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas hasil yang diperoleh. Alat ukur ini diadaptasi dari penelitian terdahulu terkait partisipasi politik di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap konteks lokal Bondowoso.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat kepercayaan politik yang rendah hingga sedang, serta pengetahuan politik yang umumnya berada dalam kategori sedang. Rendahnya partisipasi politik yang ditemukan dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran politik yang cukup baik, hal tersebut tidak cukup untuk mendorong partisipasi politik yang lebih aktif tanpa adanya kepercayaan yang kuat terhadap institusi politik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa limitasi, termasuk ukuran sampel yang terbatas dan potensi bias dalam instrumen pengukuran. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas ukuran sampel, mengembangkan instrumen yang lebih valid, dan mempertimbangkan faktor kontekstual yang lebih luas untuk mendalami lebih dalam tentang dinamika partisipasi politik dan persepsi masyarakat terhadap proses politik lokal.

Keywords: Partisipasi politik, Kepercayaan Politik, Kesadaran Politik

I. INTRODUCTION

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Meskipun pemilihan umum (pemilu) sering dianggap sebagai manifestasi utama partisipasi politik, konsep ini sebenarnya jauh lebih luas dan kompleks. Weiss (Weiss, 2020) mendefinisikan partisipasi politik sebagai berbagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Definisi ini menekankan bahwa partisipasi politik bukan hanya tentang memberikan suara, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dalam proses politik secara keseluruhan.

Data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso mencatat partisipasi pemilu sebesar 87%, jauh di atas rata-rata nasional 81% (Antara, 2024; Permani, 2024). Angka ini mengindikasikan potensi kuat keterlibatan masyarakat Bondowoso dalam proses demokrasi. Namun, partisipasi politik tidak hanya tentang kehadiran di bilik suara saat Pemilu. Meskipun partisipasi 87% mengesankan, hal ini hanya mencerminkan satu aspek dari keterlibatan politik warga. Partisipasi politik juga mencakup keterlibatan dalam diskusi politik, pengawasan kinerja pejabat terpilih, dan partisipasi dalam kegiatan politik di luar siklus pemilu (Sairambay, 2020). Oleh karena itu, tingginya angka partisipasi dalam pemilu tidak serta-merta menjamin bahwa masyarakat memiliki keterlibatan yang berkelanjutan dan bermakna dalam proses politik (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Kesenjangan ini menyoroti perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai berbagai bentuk partisipasi politik di Bondowoso terutama menjelang momen Pilkada. Studi yang ada seringkali berfokus pada angka partisipasi pemilu, tetapi kurang memperhatikan dimensi lain dari partisipasi politik yang sama pentingnya, seperti keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan lokal atau aktivitas-aktivitas politik informal (Sepyah et al., 2022). Isu-isu seperti korupsi, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, dan ketimpangan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi tingkat dan kualitas partisipasi politik masyarakat. Seperti

yang diargumentasikan oleh (Surbakti et al., 2011) penurunan partisipasi politik dapat mengancam legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, memahami dinamika partisipasi politik di Kabupaten Bondowoso menjadi sangat krusial untuk menjaga vitalitas demokrasi lokal.

Lebih lanjut, studi ini memiliki urgensi dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Sejak era reformasi, pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola urusan daerahnya. Aspek ini, seperti yang diungkapkan oleh (Ristanti & Handoyo, 2017), membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi partisipasi politik di tingkat lokal. Dalam konteks Bondowoso, penting untuk memahami bagaimana dinamika otonomi daerah ini mempengaruhi pola partisipasi politik masyarakat.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada partisipasi dalam pemilu, tetapi juga mengeksplorasi indikator partisipasi politik lainnya seperti kepercayaan politik, kesadaran dan pengetahuan politik dalam konteks penyelenggaraan pemilukada yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Ini sejalan dengan konsep "demokrasi deliberatif" yang dikemukakan oleh Habermas dalam (Kadarsih, 2018), yang menekankan pentingnya diskusi publik dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan memahami tingkat partisipasi politik masyarakat secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses politik di Kabupaten Bondowoso. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika partisipasi politik di tingkat lokal di Indonesia, serta menyumbang pada diskusi yang lebih luas tentang kualitas demokrasi di negara-negara berkembang..

II. LITERATURE REVIEW

Partisipasi politik merupakan konsep multidimensi yang telah diteliti secara ekstensif dalam ilmu politik dan sosiologi. Meskipun tidak ada satu teori tunggal yang secara eksplisit membagi partisipasi politik menjadi kepercayaan, pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi, berbagai peneliti telah mengeksplorasi aspek-aspek ini sebagai komponen penting dalam memahami keterlibatan warga negara dalam proses politik.

Konsep partisipasi politik telah mengalami evolusi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan kontribusi besar dari karya Russell J. Dalton. (R. J. Dalton, 2008) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara dalam proses yang mempengaruhi seleksi pejabat pemerintah dan/atau tindakan yang mereka ambil. Dalam bukunya "*Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial*

Democracies", Dalton menekankan bahwa partisipasi politik mencakup spektrum yang luas dari aktivitas, mulai dari voting hingga aktivisme grassroots.

Dalton (R. J. Dalton, 2008) mengidentifikasi beberapa dimensi kunci dalam mengukur partisipasi politik:

1. Partisipasi elektoral: meliputi voting dan keterlibatan dalam kampanye politik.
2. Partisipasi berbasis organisasi: termasuk keanggotaan dalam partai politik atau kelompok kepentingan.
3. Partisipasi berbasis kontak: komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah atau representatif politik.
4. Partisipasi protes: termasuk demonstrasi, petisi, dan bentuk-bentuk protes lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, (R. J. Dalton, 2000) dalam "*Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*" edisi keenam, memperluas pemahaman tentang partisipasi politik dengan mempertimbangkan perubahan teknologi dan sosial. Ia menekankan pentingnya bentuk-bentuk partisipasi baru, seperti aktivisme online dan penggunaan media sosial dalam mobilisasi politik.

Dalton dan Welzel (R. J. Dalton & Welzel, 2015) dalam "*The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens*" lebih jauh mengeksplorasi pergeseran dari "partisipasi warga yang patuh" ke "partisipasi warga yang asertif". Mereka berpendapat bahwa warga negara modern cenderung lebih kritis terhadap otoritas politik dan lebih cenderung terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi yang menantang elite (elite-challenging).

Dalam konteks pengukuran partisipasi politik masyarakat, pendekatan Dalton menawarkan kerangka kerja yang komprehensif. (R. Dalton et al., 2010) dalam "*The Individual-Institutional Nexus of Protest Behaviour*" menyarankan penggunaan skala multi-item untuk mengukur berbagai bentuk partisipasi politik. Mereka mengusulkan pengukuran yang mencakup tidak hanya frekuensi partisipasi, tetapi juga intensitas dan variasi bentuk partisipasi.

Berdasarkan tinjauan literatur ini, dapat disimpulkan bahwa pengukuran partisipasi politik masyarakat, mengikuti konsep Dalton, harus bersifat multidimensi, mempertimbangkan berbagai bentuk partisipasi konvensional dan non-konvensional, serta sensitif terhadap konteks sosial-politik dan kesenjangan partisipasi. Pendekatan ini memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis dan memahami dinamika partisipasi politik dalam masyarakat kontemporer.

III. METHOD

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menginvestigasi multidimensional tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang generatif tentang tingkat

partisipasi politik masyarakat (Creswell, 2003). Partisipan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik non probability dengan menggunakan sampling accidental, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari responden yang tersedia dan bersedia berpartisipasi (Etikan, 2016). Kriteria inklusi penelitian yaitu; warga Kabupaten Bondowoso yang sudah pernah terlibat dalam proses politik, minimal pernah mengikuti proses Pemilu di wilayahnya, mengikuti pendekatan yang digunakan dalam studi partisipasi politik sebelumnya (R. J. Dalton, 2008). Survei didistribusikan secara daring melalui platform yang dapat diakses oleh responden potensial, memanfaatkan keunggulan metode pengumpulan data online dalam hal efisiensi dan jangkauan.

Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang tingkat partisipasi politik responden. Kuesioner dikembangkan berdasarkan literatur terkait dan hasil diskusi dengan ahli, mengikuti prinsip-prinsip pengembangan instrumen survei yang valid dan reliabel (DeVellis, 2017). Survei dilakukan dalam rentang waktu satu bulan, dimulai dengan tahap adopsi kuesioner partisipasi politik, mengacu pada instrumen yang telah divalidasi dalam studi (Amanda et al., 2019). Partisipan diundang untuk berpartisipasi melalui tautan yang disebarluaskan melalui media sosial, forum daring, dan e-mail, mengadopsi strategi rekrutmen responden yang umum digunakan dalam survei daring (Baltar & Brunet, 2012). Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis ini mencakup perhitungan statistik deskriptif seperti mean, median, dan deviasi standar untuk menggambarkan distribusi variabel-variabel yang terkait dengan partisipasi politik, dengan menggunakan software Jamovi dan SPSS versi 16.

IV. RESULTS/FINDINGS

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keterlibatan warga negara dalam proses politik. Berbagai faktor, termasuk kepercayaan, kesadaran, dan pengetahuan, dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Data dikumpulkan dari 92 responden yang mengisi kuesioner yang mencakup indikator kepercayaan, kesadaran, pengetahuan, partisipasi, dalam variabel partisipasi politik. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memahami distribusi masing-masing indikator. Uji normalitas dan reliabilitas juga dilakukan untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jeniskelamin	Counts	% of Total	Cumulative %
Laki-Laki	52	55.9 %	55.9 %

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jeniskelamin	Counts	% of Total	Cumulative %
Perempuan	41	44.1 %	100.0 %

Dalam penelitian ini, terdapat 92 partisipan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, dengan sebagian besar (55.9%) merupakan jenis kelamin laki-laki, dan sisanya (44.1%) merupakan jenis kelamin perempuan.

Tabel 2. Usia Responden

KategoriUsia	Counts	% of Total	Cumulative %
17-25	74	79.6 %	79.6 %
26-35	14	15.1 %	94.6 %
36-55	5	5.4 %	100.0 %

Sementara itu, dalam kategori usia, partisipan terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok usia 17-25 tahun mendominasi dengan 79.6%, diikuti oleh kelompok usia 26-35 tahun yang menyumbang 15.1%, dan kelompok usia 36-55 tahun yang merupakan 5.4% dari total partisipan.

Tabel 3. Blueprint Alat Ukur Partisipasi Politik

Variabel	Indikator	Jumlah	Nomer aitem sebelum gugur	Nomer aitem setelah digugurkan
Partisipasi politik	Tingkat kepercayaan	9	1,2,3,4,5,6,10,11,12	1,2,3,4,5,6,10,11
	Kesadaran politik	3	7,8,9	7,8,9
	Pengetahuan politik	3	13,14,15	13,14,15
	Partisipasi politik	4	16,17,18,19	16,17,18,19
Jumlah aitem		19		18

Dalam mengukur partisipasi politik, peneliti mengadopsi empat dimensi yang diturunkan dalam indikator berikut : (1) Tingkat Kepercayaan dalam Partisipasi Politik:

Variabel ini mengukur seberapa tinggi tingkat kepercayaan individu terhadap partisipasi politik. Terdapat 9 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kepercayaan ini. Indikator-indikator ini dipilih untuk mencakup berbagai dimensi kepercayaan terhadap proses politik dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik. (2) Kesadaran Politik: Variabel ini mencerminkan sejauh mana individu memiliki kesadaran terhadap isu-isu politik yang relevan. Dengan 3 indikator yang dipilih, penelitian ini fokus pada pengukuran tingkat kesadaran individu terhadap berbagai aspek politik yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku mereka. (3) Pengetahuan Politik: Variabel ini mengevaluasi pengetahuan individu tentang politik. Dengan menggunakan 3 indikator, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana partisipan memiliki pengetahuan tentang sistem politik, proses politik, dan isu-isu yang relevan dalam konteks politik. (4) Partisipasi Politik: Variabel ini mengukur tingkat partisipasi politik individu, yaitu seberapa sering mereka terlibat dalam aktivitas politik yang meliputi pemilihan umum, kampanye politik, atau kegiatan sosial politik lainnya. Dengan 4 indikator yang dipilih, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi pola partisipasi politik dan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi aktif dalam konteks yang diteliti

Tabel 4. Alat Ukur Partisipasi Politik

Nomor aitem	Pertanyaan	Indikator	Keterangan	Nilai Validitas Spearman Rho
1	Apakah anda setuju bila hasil Pilkada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ?	kepercayaan	Valid	0,23**
2	Apakah anda setuju bahwa pemerintah bekerja sesuai kepentingan masyarakat ?	kepercayaan	Valid	0,18*
3	Apakah Anda setuju bahwa calon kepala daerah harus memiliki rekam jejak yang bersih dan kompeten dalam memimpin ?	kepercayaan	Valid	0,26***
4	Apakah Anda setuju bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ?	kepercayaan	Valid	0,28***
5	Apakah Anda setuju bahwa partai politik harus memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat ?	kepercayaan	Valid	0,35***
6	Apakah Anda setuju bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu cara	kepercayaan	Valid	0,36***

	untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal ?			
7	Apakah Anda setuju bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat penting untuk memperkuat demokrasi ?	kesadaran	Valid	0,33***
8	Apakah Anda setuju bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) harus diawasi secara ketat untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan ?	kesadaran	Valid	0,33***
9	Apakah anda setuju bahwa partisipasi dalam Pilkada merupakan cara yang efektif untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan politik di tingkat lokal ?	kesadaran	Valid	0,36***
10	Apakah Anda setuju bahwa Pilkada seharusnya tidak dipengaruhi oleh intervensi politik eksternal dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ?	kepercayaan	Valid	0,45***
11	Apakah anda setuju bahwa pilkada akan berkomitmen memajukan proses politik ?	kepercayaan	Valid	0,31***
12	Apakah anda setuju dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) terjadi money politik?	kepercayaan	Gugur	0,14
13	Apakah sekarang dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) salah satu syaratnya harus mengutamakan putra asli daerah?	Pengetahuan	Valid	0,15*
14	Apakah anda setuju/tidak setuju bahwa pemilu yang diadakan secara serentak bertujuan dapat menguatkan sistem presidensial?	Pengetahuan	Valid	0,28***
15	Asas pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dikenal sebagai Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) menjadi dasar pelaksanaan dalam proses pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), apakah anda setuju/tidak setuju dengan pernyataan tersebut?	Pengetahuan	Valid	0,33***
16	Berpartisipasi aktif dalam Pilkada tidak hanya terbatas pada pemungutan suara, tetapi juga bisa melalui pengawasan, edukasi pemilih, serta berkontribusi dalam kampanye yang	partisipasi	Valid	0,33***

	positif dan konstruktif. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan pernyataan tersebut?			
17	Dialog rutin tentang pemilu maupun pilkada merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam proses pemilihan. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan diadakannya dialog rutin dalam pemilu/pilkada?	partisipasi	Valid	0,32***
18	Apakah anda setuju/tidak setuju bahwa dalam menyampaikan aspirasi dalam pemilu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara?	partisipasi	Valid	0,30***
19	Menurut anda, apakah anda setuju/tidak setuju dengan keterlibatan dalam politik hanya untuk mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem politik?	partisipasi	Valid	0,18*

Dalam tabel menunjukkan tanda bintang (***) berkorelasi di derajat kepercayaan 99% sedangkan tanda (**) berkorelasi dalam derajat kepercayaan 95%. Adapun aitem nomor 12 digugurkan karena tidak memenuhi syarat sebagai aitem pertanyaan yang valid. Meskipun terdapat aitem yang berkorelasi dalam tanda (*) dengan nilai spearman rho yang rendah, peneliti memutuskan untuk memasukkan dalam kategori valid, meskipun dalam batas ambang penerimaan. Uji normalitas data penelitian menghasilkan;

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	Hasil
Shapiro-wilk p	<.001

Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menghasilkan nilai $p < 0.001$, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Hal ini berarti analisis lanjutan harus mempertimbangkan penggunaan uji non-parametrik untuk hasil yang lebih akurat. Selain itu menandakan penelitian ini hanya berlaku khusus terhadap sampel dengan karakteristik khusus dan tidak dapat digeneralisasikan. Sedangkan untuk uji reliabilitas terhadap hasil penelitian didapatkan;

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's α
scale	0.909

Uji reliabilitas skala dengan menggunakan Cronbach's α menghasilkan nilai 0.909, menunjukkan bahwa instrumen pengukuran memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik.

Hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut;

Tabel 7. Hasil Uji Deskriptif

		kepercayaa	kesadaran	pengetahuan	partisipasi	total
		n				
N	Valid	92	92	92	92	92
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		34.14	12.92	11.71	15.98	74.75
Std. Error of Mean		.407	.176	.175	.240	.871
Median		33.84 ^a	12.95 ^a	11.67 ^a	15.74 ^a	74.00 ^a
Mode		32	12 ^c	12	16	74
Std. Deviation		3.904	1.685	1.681	2.301	8.353
Variance		15.244	2.840	2.825	5.296	69.772
Range		16	6	7	8	36
Minimum		24	9	8	12	54
Maximum		40	15	15	20	90
Sum		3141	1189	1077	1470	6877
Percentiles	25	31.78 ^b	11.66 ^b	10.50 ^b	14.40 ^b	70.22 ^b
	50	33.84	12.95	11.67	15.74	74.00
	75	37.27	14.39	12.70	17.18	80.80

Tabel ini memberikan gambaran tentang distribusi nilai untuk masing-masing variabel yang diukur dalam penelitian, termasuk nilai rata-rata, deviasi standar, median, mode, serta nilai minimum dan maksimum. Data ini kemudian digunakan untuk membuat pengelompokkan nilai dan mengubah data menjadi kategorik; menjadi sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. Pengelompokkan berdasarkan nilai kuartil dari responden.

Tabel 8. Tingkat Kepercayaan Politik

kepercayaan	Counts	% of Total	Cumulative %
Sangat rendah	18	19.6 %	19.6 %
rendah	26	28.3 %	47.8 %
sedang	25	27.2 %	75.0 %
tinggi	23	25.0 %	100.0 %

Tabel 8. Tingkat Kepercayaan Politik

kepercayaan	Counts	% of Total	Cumulative %
-------------	--------	------------	--------------

Kepercayaan memiliki rentang antara 24 hingga 40, dengan persentil 25 sebesar 31.78 dan persentil 75 sebesar 37.27. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa kategori kepercayaan terbesar berada pada tingkat rendah dengan 28.3%, diikuti oleh tingkat sedang dengan 27.2%. Sebanyak 25% responden berada pada tingkat kepercayaan sangat rendah, dan 25% lainnya berada pada tingkat kepercayaan tinggi.

Tabel 9. Tingkat Kesadaran Politik

kesadaran	Counts	% of Total	Cumulative %
Sangat rendah	17	18.5 %	18.5 %
Rendah	23	25%	43.5 %
Sedang	29	31.5 %	75.0%
Tinggi	23	25.0%	100.0 %

Rata-rata kesadaran politik adalah 12.92 dengan standar deviasi 1.685. Rentang nilai kesadaran berkisar antara 9 hingga 15, dengan persentil 25 sebesar 11.66 dan persentil 75 sebesar 14.39. Frekuensi terbesar berada pada tingkat kesadaran sedang sebesar 31.5%, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang sedang. Sebanyak 18.5% responden berada pada tingkat kesadaran sangat rendah, sementara 25% berada pada tingkat kesadaran tinggi.

Tabel 10. Tingkat Pengetahuan Politik

pengetahuan	Counts	% of Total	Cumulative %
Sangat rendah	23	25.0 %	25.0 %
Rendah	14	15.2 %	40.2 %
Sedang	34	37.0 %	77.2 %
Tinggi	21	22.8 %	100.0 %

Rata-rata pengetahuan adalah 11.71 dengan standar deviasi 1.681. Rentang nilai pengetahuan antara 8 hingga 15, dengan persentil 25 sebesar 10.50 dan persentil 75 sebesar 12.70. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa kategori pengetahuan terbesar berada pada tingkat sedang sebesar 37%, mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki

tingkat pengetahuan politik yang sedang. Sebanyak 25% responden memiliki tingkat pengetahuan sangat rendah, dan 22.8% berada pada tingkat pengetahuan tinggi.

Tabel 11. Tingkat Aspek Partisipasi

partisipasi	Counts	% of Total	Cumulative %
Sangat rendah	23	25.0 %	25.0 %
Rendah	15	16.3 %	41.3 %
Sedang	33	35.9 %	77.2 %
Tinggi	21	22.8 %	100.0 %

Rata-rata partisipasi adalah 15.98 dengan standar deviasi 2.301. Rentang nilai partisipasi berkisar antara 12 hingga 20, dengan persentil 25 sebesar 14.40 dan persentil 75 sebesar 17.18. Frekuensi terbesar berada pada tingkat partisipasi sedang sebesar 35.9%, mencerminkan bahwa sebagian besar responden terlibat dalam partisipasi politik dengan intensitas sedang. Sebanyak 25% responden berada pada tingkat partisipasi sangat rendah, sementara 22.8% berada pada tingkat partisipasi tinggi.

Tabel 12. Keseluruhan Tingkat Partisipasi Politik

varpartisipasipolitik	Counts	% of Total	Cumulative %
Sangat Rendah	23	25.0 %	25.0 %
Rendah	27	29.3 %	54.3 %
Sedang	19	20.7 %	75.0 %
Tinggi	23	25.0 %	100.0 %

Total partisipasi politik memiliki rata-rata 74.75 dengan standar deviasi 8.353. Rentang nilai total partisipasi politik berkisar antara 54 hingga 90, dengan persentil 25 sebesar 70.22 dan persentil 75 sebesar 80.80. Frekuensi total partisipasi politik menunjukkan bahwa kategori terbesar adalah pada tingkat rendah dengan 29.3%, diikuti oleh tingkat sangat rendah dan tinggi masing-masing sebesar 25%.

V. DISCUSSION

Berdasarkan temuan, tingkat kepercayaan mayoritas responden berada pada kisaran rendah hingga sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi politik di kalangan responden masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara tambahan oleh peneliti terhadap beberapa responden, faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap

kinerja pemerintah, kurangnya transparansi, dan rendahnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepercayaan politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Schlozman & Brady, 2022) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan informasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi, berkontribusi pada rendahnya partisipasi politik. Penelitian lain oleh (Azizah & Kholifah R, 2023) juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Indonesia mengalami kemunduran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik diantaranya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan (Wirawan & Yaya, 2024). Transparansi pemerintah desa terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, meskipun kepuasan masyarakat tidak memediasi pengaruh tersebut (Wirawan & Yaya, 2024). Oleh karena itu, partisipasi dan transparansi dianggap sebagai instrumen penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas juga menjadi indikator utama kemampuan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan publik (Rauf & Andriyani, 2023).

Sedangkan dalam aspek kesadaran politik, mayoritas responden berada pada kategori sedang dengan persentase 31.5%, diikuti oleh 25% responden yang memiliki tingkat kesadaran politik tinggi. Kesadaran politik yang sedang pada mayoritas responden mengindikasikan bahwa sebagian besar individu memiliki pengetahuan dasar tentang isu-isu politik dan hak-hak mereka dalam sistem politik, namun belum sepenuhnya terlibat atau memahami secara mendalam peran mereka sebagai warga negara yang aktif. Penelitian mengenai kesadaran politik di Indonesia menunjukkan adanya tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebuah studi terhadap mahasiswa menemukan bahwa 88,2% hanya mengikuti isu-isu politik populer, menunjukkan terbatasnya pemahaman mendalam (Ulfa et al., 2021).

Demikian pula penelitian di tingkat desa menunjukkan rendahnya kesadaran politik, dimana hanya 29,3% responden yang memiliki pengetahuan tentang kesadaran politik (Dio Lavarino & Wiyli Yustanti, 2016). Kebangkitan teknologi informasi telah menciptakan peluang baru bagi keterlibatan politik, namun tantangan seperti disinformasi dan polarisasi masih ada (Sakinatuz Zahro et al., 2023). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan dasar mengenai isu-isu politik dan hak-hak mereka, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami atau berpartisipasi aktif dalam sistem politik. Ini menunjukkan perlunya program pendidikan politik yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan politik yang tepat dapat mendorong individu untuk lebih memahami dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan pada akhirnya, meningkatkan partisipasi politik.

Kemudian pada tingkat pengetahuan politik, sebagian besar responden berada pada kategori sedang, dengan persentase 37%. Namun, 25% responden memiliki tingkat pengetahuan politik yang sangat rendah, dan 15.2% lainnya berada pada kategori pengetahuan politik rendah. Tingkat pengetahuan politik yang sedang mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik tentang isu-isu politik, terdapat sebagian besar populasi yang masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai sistem politik, peraturan, dan aktor-aktor yang berperan dalam pemerintahan. Keterbatasan akses informasi politik yang akurat dan relevan dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan politik di kalangan responden. Penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya akses terhadap informasi politik yang akurat berkontribusi terhadap rendahnya pengetahuan politik di kalangan responden, khususnya pemilih muda.

Studi menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki pemahaman yang buruk tentang konsep, peran, dan fungsi partai politik, dan seringkali memandang mereka secara negatif (Limilia & Ariadne, 2018). Media memainkan peran penting dalam membentuk struktur pengetahuan politik dan mendorong partisipasi di kalangan pemilih muda baru (Sah Allam et al., 2021). Namun penyebaran hoax dan berita palsu dapat menyesatkan terutama mengenai informasi politik (Nurhaipah & Ramallah, 2024). Untuk mengatasi hal ini, literasi media sangat penting bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik, menyaring konten, dan menemukan sumber yang akurat (Nurhaipah & Ramallah, 2024). Selain itu, teknologi telah membuka peluang baru bagi partisipasi politik, namun tantangan seperti disinformasi dan polarisasi dapat menghambat kesadaran politik yang sehat (Sakinatuz Zahro et al., 2023). Upaya meningkatkan kesadaran politik melalui inisiatif pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat kesadaran politik di Indonesia (Sakinatuz Zahro et al., 2023).

Dan pada aspek partisipasi politik, mayoritas responden berada pada tingkat partisipasi politik sedang, yaitu sebesar 35.9%, diikuti oleh 25% responden dengan tingkat partisipasi sangat rendah dan 22.8% responden dengan partisipasi tinggi. Rata-rata partisipasi politik berada pada angka 15.98 dengan standar deviasi 2.301, yang menunjukkan bahwa partisipasi politik responden bervariasi namun cenderung pada tingkat menengah. Partisipasi politik yang sedang menunjukkan bahwa responden umumnya terlibat dalam aktivitas politik, meskipun tidak dalam intensitas yang tinggi. Partisipasi politik yang rendah atau sangat rendah pada sebagian besar responden dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan pada institusi politik, rendahnya motivasi, atau kurangnya informasi tentang pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Fenomena ini sesuai dengan studi (Mujani et al., 2018), yang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan partisipasi politik di Indonesia pasca-reformasi, tantangan untuk meningkatkan partisipasi

politik tetap ada, terutama di kalangan kelompok yang lebih muda atau kelompok dengan akses terbatas terhadap informasi.

Secara keseluruhan, tingkat multidimensi partisipasi politik responden menunjukkan bahwa 29,3% berada pada kategori partisipasi politik rendah. Hal ini diikuti oleh 25% responden yang menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat rendah dan tinggi. Rata-rata total skor partisipasi politik adalah 74,75, dengan standar deviasi sebesar 8,353. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kepercayaan politik, meskipun dalam aspek kesadaran pengetahuan dan kesadaran politik, responden termasuk dalam kategori sedang. Penelitian lain secara konsisten menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat kepercayaan politik dan partisipasi politik. Semakin tinggi tingkat kepercayaan politik, semakin besar pula partisipasi politik di berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula. Sebagai contoh, penelitian oleh (Hasbi Wahyudi et al., 2013) menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki kepercayaan politik lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik. Demikian pula, (Akhrani et al., 2018) menemukan bahwa pemilih muda yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah lebih berpartisipasi dalam proses politik. Faktor-faktor seperti status sosial dan ekonomi, kesadaran politik, serta kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan penting dalam menentukan partisipasi politik, sebagaimana diungkapkan oleh (Aspiran, 2017).

Selain itu, sebuah studi oleh (Anggraini et al., 2018) menemukan bahwa kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik dalam pemilu tahun 2015. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan, terutama di kalangan pemilih muda yang merupakan mayoritas pemilih, pemerintah dan partai politik harus fokus pada peningkatan kinerja dan membangun kepercayaan publik. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memperkuat argumen bahwa kepercayaan politik yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan partisipasi politik dalam berbagai konteks, menjadikannya sebagai elemen kunci dalam memperkuat demokrasi.

VI. CONCLUSION

Berdasarkan temuan penelitian ini, tingkat kepercayaan politik di kalangan responden umumnya berada pada kategori rendah hingga sedang, yang secara signifikan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi politik secara keseluruhan. Hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, mengindikasikan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat kepercayaan dan partisipasi politik di antara responden. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya transparansi, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik menurut

beberapa responden menjadi penyebab utama dari rendahnya kepercayaan politik. Selain itu, meskipun sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran politik yang cukup baik, keterbatasan akses terhadap informasi politik yang akurat dan relevan tetap menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepercayaan politik yang rendah berkontribusi pada rendahnya partisipasi politik di berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih muda.

Rendahnya partisipasi politik yang ditemukan dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran politik yang cukup baik, hal tersebut tidak cukup untuk mendorong partisipasi politik yang lebih aktif tanpa adanya kepercayaan yang kuat terhadap institusi politik. Kepercayaan politik yang rendah ini tidak hanya menghambat keterlibatan aktif dalam proses politik, tetapi juga dapat memperlemah legitimasi pemerintahan dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan warga negara. Mengingat pentingnya kepercayaan politik sebagai elemen kunci dalam memperkuat demokrasi, perlu ada upaya serius untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Berdasarkan temuan ini, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi politik. Pemerintah dan partai politik sebaiknya mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, pendidikan politik yang lebih intensif perlu menjadi prioritas, terutama bagi pemilih muda, dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik, pengetahuan tentang sistem politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mengingat data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal, penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan metode statistik non-parametrik yang lebih sesuai, serta mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi politik, seperti peran media dan faktor budaya. Literasi media juga harus ditingkatkan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi politik yang akurat dan mampu menyaring informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi politik dapat berjalan lebih efektif, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik.

Acknowledgments

Kami mengucapkan terima kasih kepada LTS Foundation atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan Program BKP MBKM Riset, yang telah memungkinkan kami untuk mengembangkan keterampilan riset dan memperoleh wawasan akademik yang berharga. Kami juga menghargai bimbingan dari mentor dan tim LTS Foundation yang telah memberikan arahan, fasilitas, serta lingkungan yang kondusif untuk penelitian ini. Selain

itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian. Dukungan dari semua pihak sangat berarti dalam memperkaya pengalaman akademik dan profesional kami.

References

- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Political Trust and Political Participation of Novice Voters. *Mediapsi*, 4(1), 1-6. <http://mediapsi.ub.ac.id/index.php/mediapsi/article/view/102>
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1). <https://doi.org/10.25077/jmu.8.1.179-188.2019>
- Anggraini, M., Asrinaldi, & Zetra, A. (2018). Pengaruh kesadaran dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Dharmasraya pada pilkada 2015. *Jurnal Madania*, 8(1).
- Antara. (2024). Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024. *Antara: Kantor Berita Indonesia, Infografik*. <https://www.antaranews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024>
- Aspiran, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 1-19. <http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/1491>
- Azizah, D. N., & Kholifah R, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.117>
- Baltar, F., & Brunet, I. (2012). Social research 2.0: Virtual snowball sampling method using Facebook. *Internet Research*, 22(1). <https://doi.org/10.1108/10662241211199960>
- Creswell, J. W. (2003). Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>
- Dalton, R. J. (2000). Citizen politics. Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. *Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies.*, April.

-
- Dalton, R. J. (2008). Citizenship norms and the expansion of political participation. *Political Studies*, 56(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00718.x>
- Dalton, R. J., & Welzel, C. (2015). The civic culture transformed: From allegiant to assertive citizens. In *The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139600002>
- Dalton, R., Van Sickle, A., & Weldon, S. (2010). The individual-institutional nexus of protest behaviour. *British Journal of Political Science*, 40(1). <https://doi.org/10.1017/S000712340999038X>
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale Development Theory and Applications (Fourth Edition)*. SAGE Publication, 4.
- Dio Lavarino & Wiyli Yustanti. (2016). PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HAJIMENA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3).
- Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1). <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Hasbi Wahyudi, Tantio Fernando, Azhari Ahmad, Ayu Khairani, Fatimah, Ivan Muhammad Agung, & Mirra Noor Milla. (2013). Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(Desember), 94–99.
- Kadarsih, R. (2018). DEMOKRASI DALAM RUANG PUBLIK: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, IX(1).
- Limilia, P., & Ariadne, E. (2018). Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(1). <https://doi.org/10.7454/jps.2018.5>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). Voting behavior in Indonesia since democratization: Critical democrats. In *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. <https://doi.org/10.1017/9781108377836>
- Nurhaipah, T., & Ramallah, Z. (2024). LITERASI MEDIA DALAM MENANGKAL INFORMASI HOAKS JELANG KONTES POLITIK 2024. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(2). <https://doi.org/10.25124/ijdp.v2i2.6834>

-
- Permani, A. W. (2024, May 25). KPU Bondowoso: Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Melampaui Target Nasional. 4–9. <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/712360/kpu-bondowoso-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-melampaui-target-nasional>
- Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2). <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850>
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2).
- Sah Allam, S. N., Hassan, M. S., Ridzuan, A. R., Sultan Mohideen, R., & Ilyas, I. Y. (2021). How Media Literacy Competency Contribute to Political Participation Integrity Among Young People. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9021>
- Sairambay, Y. (2020). Reconceptualising political participation. *Human Affairs*, 30(1). <https://doi.org/10.1515/humaff-2020-0011>
- Sakinatuz Zahro, Miladia Nur Kamilah, Muhammad Ardiansyah, Isabna Maghfirotus Safitri, Putri Sofina Naharina, & Alfiana Nanda Waraswati. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49–64. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i2.34>
- Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (2022). Political Science and Political Participation. In *The Oxford Handbook of Political Participation*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198861126.013.3>
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108>
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. In *Seri Buku Demokrasi Elektoral*.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutahiran Daftar. In *Seri Demokrasi Elektoral*.
- Ulfa, N. S., Putri, A. S., Prastianti, V. N., & Hidayanti, R. (2021). Survei Pemetaan Isu Politik Indonesia Pada Mahasiswa Rekayasa Pertanian, Institut Teknologi Bandung. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 47–53. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.284>

-
- Weiss, J. (2020). What Is Youth Political Participation? Literature Review on Youth Political Participation and Political Attitudes. In *Frontiers in Political Science* (Vol. 2). <https://doi.org/10.3389/fpos.2020.00001>
- Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 87–104. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20334>